



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2019
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN RI

1.	RADAR BANTEN	4.	SATELIT NEWS
2.	BANTEN POS		
③	KABAR BANTEN		

JANUARI	MEI	SEPTEMBER	2019
FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
MARET	JULI	NOVEMBER	
APRIL	26 AGUSTUS	DESEMBER	

Proyek Pemeliharaan Jalan

Belanja Material Kelebihan Bayar

SERANG, (KB).- Belanja bahan material kegiatan pemeliharaan jalan di dua organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Serang diketahui kelebihan bayar senilai Rp 222.335.193.

Hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Banten atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Serang Tahun 2018. Dua OPD tersebut, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP).

Kepala DPUPR Kota Serang M Ridwan mengatakan, pihaknya sudah menindaklanjuti temuan BPK RI tersebut, dengan menghubungi pihak ketiga untuk penyelesaiannya.

"Temuan BPK terkait kelebihan-kelebihan material saat ini secara ad-

ministrasi sudah dilakukan (tindak lanjut) dan membuat pertanggung-jawaban. Kemudian, juga sudah menghubungi pihak ketiganya untuk segera diselesaikan," katanya kepada wartawan, Ahad (25/8/2019).

Menurut dia, secara administratif temuan tersebut, sudah diselesaikan, tinggal penyelesaian secara finansial. Pihaknya juga akan melakukan evaluasi secara keseluruhan terkait hal tersebut.

"Misalkan jalan, sisi ketebalan 4 sentimeter, tapi 3,8 sentimeter. Meskipun tipis sedikit kalau kumulatif ada pengembalian. Dari sisi kualitas, sekarang itu kan penilaian bukan pada dimensi saja, tapi kualitas juga," ujarnya.

Sementara, Inspektur Pemkot Serang Yudi Suryadi menuturkan, OPD seharusnya menjadikan Inspektorat sebagai mitra yang menjadi tempat konsultasi sejak awal kegiatan. Namun, ucap dia, faktanya Inspektorat hanya dilibatkan saat sudah bermasalah.

"Ini kadang-kadang teman-teman OPD kalau ada keraguan harusnya di awal, jangan di akhir. Jadi, mereka melakukan komunikasi dan konsultasi di awal kalau memang ada keraguan," tuturnya.

Menurut dia, kondisi tersebut tidak terlepas dari minimnya pengawas di Inspektorat yang saat ini hanya memiliki 3 Inspektur Pembantu (Irban). Menurut dia, idealnya ada 4 Irban. Sementara, jumlah keseluruhan pegawai Inspektorat sebanyak 35 orang. "Idealnya di atas 50, saat ini satu Irban mengawasi beberapa OPD," katanya.

Informasi yang diperoleh **Kabar Banten**, hasil pemeriksaan atas belanja bahan/material pada DPUPR dan DPRKP menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran kegiatan pemeliharaan jalan masing-masing senilai Rp 147.248.973,15 dan Rp 75.086.220,00.

Atas permasalahan tersebut, Wali Kota Serang melalui Kepala DPRKP dan DPUPR menyatakan, sependapat

dengan temuan. BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Serang, agar memerintahkan Kepala DPRKP dan DPUPR menginstruksikan PPK memproses kelebihan pembayaran.

Diketahui, DPRKP menganggarkan belanja bahan/material senilai Rp 10.909.716.050 dengan realisasi senilai Rp 10.447.179.000 atau 95,76 persen. Realisasi tersebut, di antaranya digunakan untuk kegiatan rehabilitasi pemeliharaan jalan di lingkungan dan permukiman.

Kemudian, DPUPR menganggarkan belanja bahan/material senilai Rp 12.368.536.437 dengan realisasi senilai Rp 12.255.195.230 atau 99,08 persen dari anggaran. Dari realisasi tersebut, di antaranya digunakan untuk kegiatan rehabilitasi pemeliharaan ruas jalan kota.

Sementara itu, belum diperoleh konfirmasi dari Kepala DPRPKP Kota Serang Iwan Sumardi terkait hal tersebut. Saat dihubungi melalui telepon selularnya, yang bersangkutan belum merespon. **(Masykur/H-42)*****